

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sesuai perumusan masalah yang terdiri dari tiga yaitu:

1. Peranan Pemerintah Provinsi Papua dalam menanggulangi kemiskinan untuk mencapai tujuan *Millennium Development Goals (MDGs)* di tahun 2015 belum signifikan dan lamban sehingga waktu tersisa dua tahun membutuhkan keseriusan untuk mengukur keberhasilannya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari kendala-kendala umum berupa rendahnya sumber daya manusia Papua, letak geografis, penyebaran penduduk tidak merata dan terpencil, transportasi, Pemerintah daerah tertutup terhadap lembaga Adat dan Gereja, hak ulayat, sejarah integrasi Papua, pemekaran wilayah, kebersihan lingkungan dan kebiasaan bermain *game* dan Judi toto gelap (togel). Sedangkan kendala khusus Pemerintah adalah, keterlambatan pencairan dana, benturan regulasi, terbatasnya sarana operasional dan pengaruh politik.
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk menanggulangi kemiskinan demi terwujudnya *Millennium Development*

Goals (MDGs) 2015 yaitu, evaluasi total terhadap program-program penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta mengefektifkan fungsi koordinasi Pemerintahan dengan mengakomodir seluruh elemen masyarakat yang disertakan dengan skala prioritas wilayah dan tingkat kesulitan menurut data dan faktanya. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan sumber daya manusia Papua, pemekaran wilayah sesuai masalah dan kebutuhan, evaluasi otonomi khusus dan pemberdayaan masyarakat lokal serta terpilihnya pemimpin bertipe komunikatif, fleksibel, bersih dari KKN seperti sosok Jokowi di Jakarta. Upaya ini penting karena data resmi Badan pusat Statistik Provinsi Papua sendiri membuktikan kenaikan angka jumlah penduduk miskin bertambah 21, 80 ribu dari 944,79 menjadi 966, 58 ribu.

B. Saran

Mengacu pada hasil analisis dan kesimpulan, beberapa saran yang perlu dilakukan untuk mencapai target *Millennium Development Goals 2015* yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan evaluasi program antara SKPD dan lintas sektoral, baik yang *bersifat top down* atau dari atas (Pemerintah) ke bawah maupun *bottom up* atau dari bawah (masyarakat) ke atas, agar menemukan titik temu sehingga efektifitas dan efisiensi segala sumber daya dijaga demi mempercepat penanggulangan

kemiskinan di Papua. Langkah ini penting karena data jumlah orang miskin yang bertambah dibalik otonomi khusus dan berbagai program Pemerintah menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan *Millennium development goals* di pertanyakan.

2. Upaya mengurangi kendala-kendala dan menjaga konsentrasi Pemerintah, diharapkan kepada Pemerintah pusat, dan khususnya Pemerintah daerah Provinsi Papua supaya segera menentukan lembaga Independen yang melibatkan semua komponen, agar segala tindakan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan di lapangan/ lokasi atau daerah-daerah berpotensi berjalan sesuai rencana tanpa tergesa-gesa. Langkah ini bermaksud kinerja aparat Pemerintah tidak terganggu dan mengutamakan profesionalisme, proporsionalisme serta loyalitas seorang aparat Pemerintah tetap di jaga karena pertimbangan lainnya adalah Pemerintah sering tergesa-gesa dan memperhitungkan nilai tambah dibalik obsesi penanggulangan kemiskinan.
3. Kepada seluruh komponen yang ada di Provinsi Papua, supaya dalam proses demokrasi dapat memilih Pemimpin pro-rakyat, komunikatif, jujur, transparan demi menanggulangi kemiskinan agar keluhan-keluhan masyarakat terakomodir. Perlu menyadari bahwa hanya dengan memilih Pemimpin yang tepat akan menjawab segala harapan masyarakat. Kepada Pemimpin yang akan terpilih nantinya supaya memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia sebagai program utama, agar tahun 2040 Papua terbebas dari kemiskinan dan ketertinggalan untuk mengukur

tingkat Kesejahteraan dan kemandirian ekonomi sebagaimana program *Millennium development goals (MDGs)* dideklarasikannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Arsita Eka Prasetyawaty, 2012, *Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dalam Millennium Development Goals (MDGs)* Cet.1.Nuha Media, Yogyakarta.
- Bernad Taufani, 2012, *Kisah Nyata Anak Miskin Yang Menjadi Orang Besar, JOKOWI, From Zero to Hero*, Cetakan I, PT. Suka Buku, Yogyakarta
- Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua, 2011, *Draf Awal Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Provinsi Papua Periode 2012-2016*
- Hestu B. Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke V.Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Jonathan Houghton Sahidur R. Khandker, 2012, *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kemal A. Stamboel, 2012, *Panggilan Keberpihakan, Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2012, *Serial Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah, Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan RAD MDGs*, Bappeda Provinsi Papua
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Indonesia*, Jakarta
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan Dan Penfendalian Program Pembangunan*, Cetakan Pertama, UI Press, Jakarta
- Mirza Nasution, 2004, *Negara dan Konstirusi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muchsan, 2007, *Sistem pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Cet. Keempat,Liberty Yogyakarta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Cet. I. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Paulo Freire, 2005, *Pendidikan Sebagai Proses, Surat-Menyurat Pedagogis Dengan Para Pendidik Guinea-Bissau*, Cetakan Pertama, Ofset, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta .
- 2012, *Birokrasi Pemerintahan, Materi Kuliah Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Safi,i, 2011, *Ampih Miskin, Model Kebijakan Penuntasan Kemiskinan Dalam Perspektif Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Averros Press,Kandangan

- Samodra Wibawa, 1991, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Cetakan Pertama PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta
- Sarundajang, 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sofia Bonsafia, 2008, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi Khusus Papua*, Program Studi Magister Ilmu Hukum , Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Socrates Sofyan Yoman, 2011, *Gereja Dan Ppolitik Di Papua Barat*, Cet. I, Cenderawasih Press, Kota raja, Jayapura, Papua Barat
- Syaukani., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Tahir M. Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta .
- Tony P. Situmorang, 2004, *Pandangan Rousseau Tentang Negara Sebagai Kehendak Umum*, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Wisnubroto. Al, 2010, *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Cet. V. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

B. JURNAL :

- Castel, 2009 *"the Roads to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships"*, *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 24(3) .
- Deininger, K. 2003, *Land Policies for Growth and Poverty Reduction, World Bank Policy Research Report 2003*.
- Haris White, 2005, *"Destitution and Poverty of its Politics with Special Reference to South Asia"*, *World Development Journal*, Vol. 33.
- Honai Torang Pu Media Aspirasi, 2012, *Otonomi Khusus Papua, antara Berkah dan Petaka*, Edisi, XV/Tahun II
- Kompas, 2011, *Indonesia Masih Negara Terkorup, Negara Pelindung Koruptor dikritik*, Jumat 2 Desember, Halaman 4, Kolom 3
- Roy L. Prosterman, Robert Mitchel, Tim Hanstand (eds), 2007, *One Billion Rising: Law, Land and The Alleviation of Global Property, Nederland: Leiden University Press*.
- R. Prosterman & T. Hanstad, *"Land Reform in the Twenty-Firt Century: New Challenges, New Responses"*, *Seattle Journal For Social Justice*.
- Tim Penyusun Laporan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Indonesia Tahun 2007, 2007, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Tim Penyusun, 2008, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- UNDP, 2009, *Millennium Development Goals Report 2009*, New York: United Nation.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Bagi Khusus Provinsi Papua. Lembaran Negara Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 tahun 2001

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin. Lembaran Negara Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235 Tahun 2011

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.Jo. UU.12 Tahun 2008 . Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
Lembaran Negara. Nomor 12 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4967

Undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara nomor 3874, Jo. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 134 T Tambahan lembaran Negara nomor 4150 tahun 2001.

Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Nomor 140. Tambahan lembaran Negara Nomor 3874 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890

Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 4421 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 Tahun 2007.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan.

Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor... tahun 2012 tentang Rencana Aksi Percepatan Tuntas Buta Aksara (RAD_PTBA) Provinsi Papua tahun 2013-2017

D. KAMUS

Kamus Hukum, 2011,Cet.VI. Citra Umbara, Bandung

Kamus Bahasa Indonesia, 2008.

E. INTERNET

<http://www.sudahtauh.com>, diunduh 1 Agustus 2012, pukul 10. 22 WIB
<http://bisnis.news.viva.co.id>, diunduh 3 Agustus 2012, pukul 1. 32 WIB
<http://www.Slideshare.net>, diunduh 7 Agustus 2012, pukul 11. 25 WIB
<https://docs.google.com/-ed-Agoes.docs>, diunduh 11 Agustus 2012, pukul 23. 47 WIB
<http://cracbone.wordpress.Com>, diunduh 5 Oktober 2012, Pukul 07. 54 WIB
<http://tabloidjubi.com>, diunduh 6 Oktober 2012, pukul 8. 2 WIB
<http://www.theglobal-review.com>, diunduh 9 Oktober 2012, pukul 9. 3 WIB
<https://docs.google.com>, diunduh 11 Oktober 2012, pukul 24. 13 WIB
<http://krjogja.com>, diunduh 15 Oktober 2012, Pukul 10. 16 WIB
<http://bisnis.news.viva.co.id>, diunduh 19 Oktober 2012, pukul 23. 30 WIB
<http://www.babelprov.co.id>, diunduh 23 Oktober 2012, Pukul 15. 21 WIB
<http://sp2010.bps.go.id>, diunduh 27 Oktober 2012, pukul 24. 5 WIB
<http://finance.detik.com>, diunduh 2 November 2012, pukul 9. 13 WIB
<https://docs.google.com>, diunduh 8 November 2012, pukul 10. 56 WIB
<http://www.iyaa.com>, diunduh 12 November 2012, pukul 17. 9 WIB
www.republika.co.id, diunduh 24 November 2012, pukul 9. 31 WIB
<http://kepegawaian.kebumenkab.go.id>, 3 Desember 2012, pukul 24. 15 WIB
<http://berita.plasa.msn.com>, diunduh 5 Desember 2012, pukul 15. 1 WIB
<http://dprd-tegalkota.go.id>, diunduh 8 Februari 2012, pukul 15.16 WIB
<http://www.pmkri.or.id>, diunduh 7 Maret 2013, pukul 10: 22 WIB
<http://bkd.jabarprov.go.id>, diunduh, 9 Maret 2013, pukul 8.56 WIB
<http://www.republika.co.id>, diunduh, 14 Maret 2013, pukul 12.32 WIB
<http://www.suarapembaruan.com>, diunduh, 14 Maret 2013, pukul 12. 38 WIB